

Institut Studi Transportasi (Instran) pesimistis Pemprov DKI dapat memberlakukan sistem ruas jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) dalam waktu dekat ini akibat tingginya tingkat kerumitan untuk mempersiapkan perangkat pendukungnya. Pengurus harian Instran A. Izzul Waro mengatakan perangkat pendukung yang perlu disiapkan bukan hanya alat detektor di pintu masuk kawasan ERP, tetapi juga perangkat berupa in-vehicle unit, alat sensor yang harus dipasang di setiap kendaraan yang akan melintas di kawasan tersebut.

“Bagaimana Pemprov DKI menyiapkan perangkat in-vehicle unit yang harus dipasang di kendaraan sebagai tempat slot card untuk kartu pembayaran yang langsung terkoneksi dengan detektor di pintu masuk kawasan ERP,” katanya di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan Singapura pada saat pertama kali menerapkan sistem ERP harus membagikan secara cuma-cuma sekitar 700.000 unit perangkat tersebut kepada para pemilik kendaraan untuk menyukseskan pelaksanaan sistem baru itu.

Jika Pemprov DKI harus mengikuti jejak Singapura, maka pertanyaan besarnya adalah dari mana dan berapa anggaran yang harus disiapkan untuk pengadaan perangkat untuk mobil itu yang akan dibagikan kepada pemilik kendaraan agar bisa melintasi kawasan ERP.

Sebab, berdasarkan data Ditlantas Polda Metro Jaya jumlah kendaraan roda empat yang setiap hari melintas di Jakarta mencapai sekitar 3,11 juta unit, dan angka itu tidak termasuk armada angkutan umum sebanyak 859.692 unit.

Menurut Izzul, catatan penting lain yang perlu mendapat perhatian Dinas Perhubungan DKI terkait dengan sistem ERP adalah bagaimana perlakuan terhadap kendaraan dari luar Jakarta yang tidak setiap hari melintas di ruas jalan berbayar itu.

Demikian juga kendaraan yang nama pemiliknya tidak sesuai dengan nama yang tertera pada surat tanda nomor kendaraan (STNK). Sebab, di Jakarta banyak jual beli kendaraan yang tidak disertai proses balik nama kepemilikan kendaraan.

“Seluruh data kendaraan dan pemiliknya serta saldo pada kartu pembayaran yang terdapat di perangkat in-vehicle unit itu akan diinformasikan kepada detektor gerbang ERP saat kendaraan melintas di ruas jalan berbayar itu.”

Transjakarta ditambah Sementara itu Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinsa Perhubungan DKI M. Akbar mengungkapkan Pemprov dalam waktu dekat ini akan menambah jumlah armada bus Transjakarta untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang pascapemberlakuan sistem ERP.

“Harus ada penambahan armada busway untuk untuk memenuhi permintaan angkutan umum yang pasti meningkat saat ERP mulai di jalankan,” katanya.

Dia mengatakan upaya persiapan menambah armada bus Transjakarta itu dilaksanakan sambil menunggu payung hukum legal bagi penerapan sistem ERP dan retribusinya menjadi sumber pendapatan daerah. Sumber berita: Bisnis Indonesia, 4 Oktober 2010 Link: http://epaper.bisnis.com/PUBLICATIONS/BISNISINDONESIA/BI/2010/10/04/index.shtml?ArtId=148_025&Search=Y